

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai politik sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, otomatis menjadi pemimpin semua orang. Seorang pemimpin tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik.

Dengan adanya sistem rekrutmen, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya¹.

¹Teguh Adi Prasajo. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. *Jurnal POLITIKA*, Vol.4, No.2, Oktober 2013. *ejournal.undip.ac.id*. diakses pada 5 November 2021.

Adapun fungsi partai politik yang ideal adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output pada umumnya². Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan³. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu).

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Dalam konteks sistem politik indonesia, pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur proses tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena berdasarkan pasal 1 tentang ketentuan umum dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu.

² Syahputra Wengki. Pola Rekrutmen Partai Politik. Skripsi. Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang, 2012.

³Ibid.

Pencalonan anggota badan-badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia. Dalam praktik pemilu di Indonesia, rakyat pemilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat lokal, acapkali tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota perlemen.

Mewujudkan DPR yang bersih dari korupsi, maka masyarakat harus mengkritisnya sejak partai (parpol) melakukan rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah. Sebab, dari rekrutmen caleg ini kebersihan dan komitmen parpol anti korupsi itu bisa dilihat. Berbicara politik tentu memiliki landasan ideologi dan pergerakan politik serta cita-cita politik yang khas. Biasanya untuk mencapai cita-cita politiknya para pendukung sebuah partai politik menyusun sejumlah agenda politik beserta program aksinya dengan landasan nilai-nilai, cita-cita maupun ideologi yang dianut oleh sebuah partai. Cita-cita politik Partai Keadilan misalnya yaitu berupaya agar terciptanya sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bathin yang tentunya dilandasi dengan nilai-nilai ideologis.

PKS berdiri oleh aktivis-aktivis kampus yang tersebar di beberapa kampus di Indonesia dan para deklalatornya 50% berasal dari tamatan mesir (kairo). PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 dalam sebuah

konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Partai ini semula dipimpin oleh Hidayat Nurwahid sebagai presiden.

Partai Keadilan diawal berdirinya. PKS dikategorikan sebagai partai dakwah dilihat berdasarkan AD/ART yaitu Bab II (tujuan dan kegiatan) pasal 6 dan 7 serta Bab II (sasaran, kegiatan dan sarana) pasal 3. Partai ini dapat juga dikatakan sebagai salah satu partai dakwah yang di perhitungkan dalam pemilu, meskipun partai ini awalnya gagal melewati batas electoral threshold, namun partai ini dapat bangkit kembali dan menunjukkan jati diri partai tersebut layak disebut partai dakwah yang diperhitungkan.

Sampai saat ini, hampir semua partai politik mengalami masalah dalam proses seleksi calon anggota legislatif begitupun dengan partai PKS, di antara-ranya adalah: 1) masalah kualitas kandidat yang dinominasikan partai; 2) proses seleksi kandidat oleh partai; dan 3) keterlibatan pihak terkait dalam proses seleksi dan masalah pengambilan keputusan dalam menetapkan hasil-hasil seleksi oleh partai di level internal.

UU No 8 / 2012 Pasal 65 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak banyaknya 120% jumlah kursi yang di tetapkan pada setiap daerah pemelihan. Pasal 65 ayat (3) mengatur pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di lakukan dengan ketentuan:

- a. Calon anggota DPR di sampaikan kepada KPU
- b. Calon anggota DPRD provinsi di sampaikan kepada KPU provinsi yang bersangkutan, dan
- c. Calon anggota DPRD kabupaten/kota di sampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, posisi tawar partai politik di berikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan calon pemimpin yang ada di daerah maupun di pusat. Partai politik yang menjadi satu satunya agen dalam perekrutan individu-individu dari masyarakat menjadi calon anggota legislatif, selanjutnya disingkat caleg, yang nantinya akan di pilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, kualitas seleksi dan model rekrutmen calon anggota legislatif dari partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam setiap pemilihan umum.

Penelitian ini secara khusus mencoba menggali permasalahan tersebut dan menggambarkan bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan oleh Partai khususnya Partai PKS. Sebagaimana diketahui penyelenggaraan pemilu baik pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan anggota legislatif partai diharapkan mencalonkan kandidat yang berkualitas untuk menjadi anggota parlemen dan untuk menjadi presiden.

Oleh karena itu, proses seleksi kader dalam partai memiliki kekhasan dan daya tarik untuk diteliti lebih mendalam. Penelitian ini peneliti memusatkan pokok permasalahan dengan subyek dan obyek dari Partai PKS dengan melihat

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara yang diharapkan dan yang terjadi dilapangan.⁴Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu hal yang ingin diperoleh atau dicapai setelah penelitian selesai⁵. Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan manfaat praktis adalah bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dan melakukan

⁴ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta. 2010, hal : 95

⁵ Ibid. Hal:97

penelitian lebih lanjut. Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai sarana untuk menambah pengetahuan memperluas wawasan terutama yang berkenaan dengan rekrutmen calon anggota legislatif partai keadilan sejahtera kabupatenogan komering ulu , selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PKS, pentingnya melakukan rekrutmen terhadap anggota calon legislatif ini agar nanti bakal caleg yang duduk dikursi bisa menjadi pemimpin yang baik dan bermanfaat ditengah-tengah masyarakat.
- b. Bagi Lembaga Pemerintahan, bahwa pentingnya melakukan rekrutmen agar pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berkualitas.